

**PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN PURWODADI**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai
Gelar Magister Administrasi Publik



Disusun oleh:

FAIQ NAJIB HASAN

NIM. 14020122420023

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH / TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : FAIQ NAJIB HASAN
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14020122420023
3. Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Juli 1998
4. Program Studi : Magister Administrasi Publik
5. Universitas : Universitas Diponegoro Semarang
6. Alamat : Jl. Madukoro I RT 08/RW 21 Kelurahan
Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan

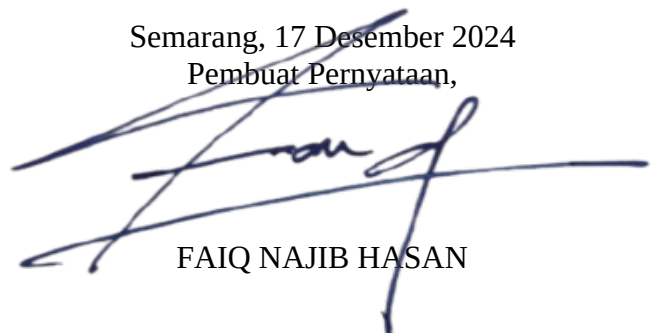
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Tesis yang saya tulis berjudul: “PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI”

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20 %.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 17 Desember 2024
Pembuat Pernyataan,


FAIQ NAJIB HASAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN
KECAMATAN PURWODADI**

TESIS

Disusun oleh:
FAIQ NAJIB HASAN
NIM. 14020122420023

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 17 Desember 2024

Susunan Tim Penguji

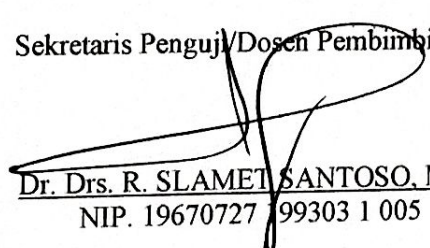
Ketua Penguji/Dosen Pembimbing I


Dr. Dra. RETNO SUNU ASTUTI, M.Si
NIP. 19621218 198803 2 001

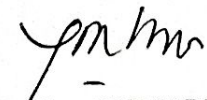
Anggota Penguji/Penguji I


Dr. Dra. AUGUSTIN RINA HERAWATI, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing II

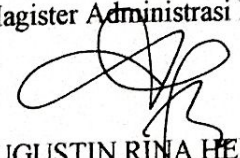

Dr. Drs. R. SLAMET SANTOSO, M.Si
NIP. 19670727 199303 1 005

Anggota Penguji/Penguji II


Prof. Dr. Dra. KISMARTINI, M.Si
NIP. 19610328 198603 2 001

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik

Semarang, 20 Desember 2024
Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Dra. AUGUSTIN RINA HERAWATI, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

ABSTRAK

PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI

Disusun oleh:
FAIQ NAJIB HASAN
NIM. 14020122420023

Regulasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan fasilitas umum. Kesadaran membayar pajak dianggap sebagai bentuk komitmen dari masyarakat sebagai wajib pajak. Penelitian ini menganalisis proses advokasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Grobogan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, dengan fokus khusus di Kelurahan Kuripan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan analisis dokumen pendukung. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti Camat Purwodadi, Kepala Kelurahan Kuripan, Petugas Pemungut PBB-P2, dan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kebijakan ini telah membuahkan hasil positif, masih terdapat tantangan seperti kurangnya komunikasi dan sosialisasi, keterlambatan distribusi SPPT dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Inovasi seperti pembayaran dengan *mobile banking*, Pos Pembayaran PBB-P2, dan intensifikasi PBB-P2 sudah diterapkan, namun masih kurang maksimal. Komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan, sosialisasi yang berkesinambungan, serta dukungan kebijakan dapat meningkatkan optimalisasi PBB-P2 dan berkontribusi pada peningkatan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Grobogan.

Kata kunci: PBB-P2, Advokasi Kebijakan, Realisasi Penerimaan

ABSTRACT

POLICY ADVOCACY PROCESS OF LAND AND BUILDING TAX IN KURIPAN VILLAGE, PURWODADI SUB-DISTRICT

Prepared by:

FAIQ NAJIB HASAN

Student ID. 14020122420023

The regulation on Land and Building Tax (PBB) is governed by Law Number 12 of 1985, which was later amended by Law Number 12 of 1994 on Land and Building Tax. PBB-P2 refers to a tax levied on land and/or buildings owned, controlled, or utilized by individuals or entities, excluding the plantation, forestry, mining, and public utility sectors. Tax awareness is considered a form of commitment from the community as taxpayers. This study analyzes the policy advocacy process of PBB-P2 in Grobogan Regency and examines its supporting and inhibiting factors, with a particular focus on Kuripan Village.

The study employs a qualitative descriptive method with an inductive approach, utilizing direct observation, in-depth interviews, and analysis of supporting documents. Interviews were conducted with stakeholders such as the Purwodadi Sub-District Head, Kuripan Village Head, PBB-P2 tax collectors, and taxpayers.

The findings reveal that although this policy has yielded positive outcomes, challenges remain, including inadequate communication and socialization, delays in the distribution of Tax Notification Letters (SPPT), and low public understanding. Innovations such as mobile banking payments, PBB-P2 Payment Posts, and tax intensification have been implemented but are not yet fully optimized. Intensive communication with stakeholders, continuous socialization, and policy support can enhance the optimization of PBB-P2 and contribute to improving PBB-P2 revenue realization in Kuripan Village, ultimately supporting Regional Original Revenue (PAD) in Grobogan Regency.

Keywords: PBB-P2, Policy Advocacy, Revenue Realization

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulisan Tesis yang berjudul **“PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.

Tujuan dari Penulisan Tesis ini adalah menjelaskan proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 yang tidak pernah menyentuh angka 80% di setiap tahunnya dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses advokasinya. Beberapa advokasi kebijakan ini diharapkan bisa ikut andil meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Grobogan. Dukungan dari beberapa *stakeholders* dalam kegiatan ini akan memudahkan penyelesaian permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun di Kelurahan Kuripan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, serta dorongan selama penyusunan Tesis ini. Rasa hormat dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada:

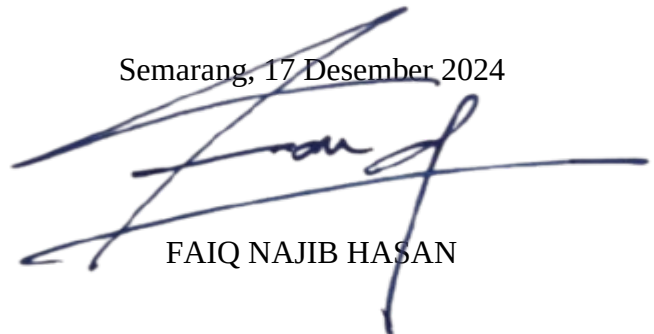
1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
3. Dr. A.P. Tri Yuniningsih, M.Si., selaku Kepala Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Augustin Rina Herawati, M.Si., selaku Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Dr. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si., yang dengan penuh dedikasi telah menjadi mentor sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang luar biasa selama proses penyusunan penelitian ini. Tanpa dukungan dan ilmu yang Ibu berikan, penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan
6. Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan luar biasa. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang selalu diberikan dalam setiap tahap penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen Departemen Administrasi Publik serta seluruh anggota civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro atas ilmu, didikan, serta bantuan yang diberikan selama masa studi penulis.
8. Istriku Annisa Puspitaningsih dan anakku tercinta Khalisa Aghnia Nisfa Sarasvati yang selalu mendoakan dalam setiap langkah;

9. Bapak dan Ibukku, serta keluarga yang ikut mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro;
10. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini, terdapat keterbatasan waktu, tenaga, dan fasilitas yang mungkin memengaruhi hasil yang dicapai. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyajian karya ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan ilmiah di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lainnya. Atas segala kekurangan yang ada, penulis memohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semarang, 17 Desember 2024



FAIQ NAJIB HASAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Identifikasi Masalah	28
1.3 Rumusan Masalah	29
1.4 Tujuan Penelitian.....	29
1.5 Manfaat Penelitian.....	30
1.6 Tinjauan Pustaka	31
1.6.1. Penelitian Terdahulu.....	31
1.6.2. Administrasi Publik.....	42
1.6.3. Paradigma Administrasi Publik.....	42
1.6.4. Kebijakan Publik	44
1.6.5. Advokasi Kebijakan	47

1.6.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Kebijakan	53
1.6.7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	55
1.7 Kerangka Pemikiran.....	58
1.7.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	58
1.7.2. Operasionalisasi Konsep	61
1.7.1.1. Proses Advokasi Kebijakan.....	61
1.7.1.2. Pendukung Penghambat Proses Advokasi Kebijakan	63
1.8 Metode Penelitian.....	64
1.8.1. Tipe Penelitian.....	64
1.8.2. Fokus Penelitian	65
1.8.3. Fenomena Penelitian	66
1.8.4. Jenis dan Sumber Data	69
1.8.5. Pemilihan Informan.....	69
1.8.6. Instrumen Penelitian.....	70
1.8.7. Teknik Pengumpulan Data	71
1.8.8. Teknik Analisis Data	74
BAB II GAMBARAN UMUM <i>SETTING</i> PENELITIAN	77
2.1 Gambaran Umum Kelurahan Kuripan	77
2.1.1. Struktur Organisasi Kelurahan Kuripan.....	80

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kuripan	82
2.2 Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Kuripan.....	85
BAB III HASIL PENELITIAN	88
3.1 Hasil Penelitian	88
3.1.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	88
3.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	124
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	151
4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	151
4.1.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	151
4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	166
BAB V PENUTUP.....	176
5.1 Kesimpulan.....	176
5.1.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	176
5.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	179
5.2 Saran.....	181

5.2.1. Analisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	181
5.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	183

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa / Kelurahan se – Kecamatan Purwodadi Tahun 2020 – 2023	23
Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Tahun 2013 s.d. 2023	24
Tabel 1.3 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu terkait Penelitian Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	35
Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep	61
Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan	63
Tabel 1.6 Fenomena Penelitian	66
Tabel 2.1 Data Penduduk Kelurahan Kuripan berdasarkan Pekerjaan Terbanyak	85
Tabel 3.1 Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan sebelum dilaksanakannya Pos Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.....	130
Tabel 3.2 Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan setelah dilaksanakannya Pos Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.....	131

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik ...	48
Gambar 1.2 “A” <i>Frame for Advocacy</i>	50
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	58
Gambar 1.4 Teknik Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana	75
Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kelurahan Kuripan	79
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kuripan	80
Gambar 3.1 SPPT PBB-P2 di Kabupaten Grobogan	91
Gambar 3.2 SIPADA BPPKAD Kabupaten Grobogan	95
Gambar 3.3 <i>Whatsapp Group</i> RW Kelurahan Kuripan	101
Gambar 3.4 Rapat <i>Coffee Morning</i> terkait PBB-P2	102
Gambar 3.5 Sosialisasi di Arisan RT/RW di Kelurahan Kuripan.....	106
Gambar 3.6 Intensifikasi Bersama BPPKAD Kabupaten Grobogan	115
Gambar 3.7 Aplikasi <i>BIMA Mobile</i> Bank Jateng untuk Pembayaran PBB-P2	122
Gambar 3.8 Pelaksanaan Pos Pembayaran PBB-P2	129